



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI
TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KE KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 5 S.D. 7 JULI 2024

Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Kabupaten Batang dalam rangka melakukan pengawasan mengenai pembiayaan pendidikan, dengan fokus terhadap pemenuhan *mandatory spending* 20% bidang pendidikan dalam APBD, evaluasi terhadap program akses dan percepatan wajib belajar 13 tahun dan strategi pencapaiannya. Adapun tujuan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan terkait pembiayaan pendidikan selain dana transfer daerah melalui APBN, serta komponen pembiayaan pendidikan yang dikelola daerah.

Kunjungan kerja dipimpin oleh Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc selaku Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dengan anggota perwakilan dari masing-masing fraksi. Kunjungan diterima langsung oleh Ari Yudianto, S.H. selaku Pj Sekretaris daerah Kabupaten Batang di kantor Bupati. Kunker ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, perwakilan Kepala Sekolah, Komite Sekolah PAUD, SD dan SMP (Negeri dan Swasta), dan perwakilan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Batang. Dalam pertemuan ini, juga hadir pejabat dari Kemendikbudristek, yaitu Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A. selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar.

Diantara permasalahan yang mengemuka dan disampaikan oleh Pj Sekda Batang dan para pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten Batang yaitu (1) masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 7,07 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 12,15 tahun, (2). Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah SMP dengan lulusan SD, dimana lulusan SD tahun ini sebesar 10.000 siswa, tetapi daya tampung SMP hanya 8000 siswa, dan (3) Masalah kekurangan guru.

Diskusi dilakukan mengenai pentingnya pemenuhan *mandatory spending* 20% APBD. Keberpihakan APBD untuk pendidikan sangat krusial, agar semua masyarakat kabupaten Batang mendapatkan hak-hak pendidikan dasar, sehingga diharapkan terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal-hal lain adalah terkait pentingnya perbaikan Akses, Mutu, dan Relevansi. Ketiganya harus berjalan dengan baik dan seimbang, dan ini memerlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan *stakeholder* pendidikan.

Berbagai permasalahan, temuan dan usulan akan menjadi bahan tim Kunker Spesifik untuk dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat bersama pemerintah, khususnya Kemendikbudristek RI.

Kabupaten Batang, 5 Juli 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang